
EQUALITY TOWARDS A CIVIL SOCIETY: ANALYSIS OF INDIVIDUAL QUALITY TOWARDS SEYYED ALI KHAMENEI'S NATIONAL IDENTITY

RIKO PUTRA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang
Putrarico21@gmail.com

Abstract

Society is a universal foundation for state formation. Living in a diverse national context involves navigating social constructs such as race, nationality, and the relationship between religion and state, including critical issues like gender equality. This necessitates a positive lifestyle aligned with the concept of a civil society, which promotes an advanced and civilized way of life with tolerance and democracy. This research examines how Iran's supreme leader, Seyyed Ali Khamenei, fosters a civil society in the context of gender equality. The study critically analyzes literature using a qualitative approach that assesses the influence of a leader's national identity based on reviews of policies, thoughts, fatwas, and speeches. A theocratic ideology shapes Iran's national identity through *Wilāyat al-Faqīh*, which governs the judicial, executive, and legislative branches. Seyyed Ali Khamenei, who has been Iran's third president and continues as its leader, significantly influences this identity. The findings reveal that Khamenei's approach to national identity in promoting a civil society amid gender equality issues grants Iranian women a dignified role, appropriate for Muslim women, by facilitating their participation in the public sphere while preserving religious and cultural values as part of the national identity.

Keywords: *Civil Society, Gender Equality, National Identity, Seyyed Ali Khamenei, Theo-Democracy.*

Abstrak

Masyarakat merupakan poin universal terbentuknya negara. Hidup bernegara dalam kemajemukan melibatkan konstruksi sosial seperti ras, kebangsaan, relasi agama-negara, serta isu penting seperti kesetaraan gender yang memerlukan pola hidup positif di tengah masyarakat, seperti konsep masyarakat madani yang mencakup gaya hidup maju dan beradab dengan semangat toleransi dan demokrasi. Konsep masyarakat madani terlihat dari dua peran dalam satu negara: sinergi antara pemimpin dan masyarakat. Penelitian ini membahas bagaimana pemimpin tertinggi Iran, Sayid Ali Khamenei, mewujudkan masyarakat madani dalam konteks kesetaraan gender. Penelitian pustaka ini dianalisis secara kritis dengan pendekatan kualitatif yang menilai pengaruh identitas nasional seorang pemimpin berdasarkan tinjauan kebijakan, pemikiran, fatwa, dan pidato. Identitas nasional Iran merupakan negara berideologi teo-demokrasi dengan menerapkan *Wilāyat al-Faqīh* yang membawahi lembaga negara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sayid Ali Khamenei, yang pernah menjabat sebagai presiden ketiga Iran dan kini masih sebagai pemimpin, memiliki pengaruh signifikan terhadap identitas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas individu Sayid Ali Khamenei terhadap identitas nasional dalam membentuk masyarakat madani di tengah isu kesetaraan gender memberikan posisi mulia kepada perempuan Iran, sesuai dengan kedudukan perempuan Muslim, dengan memberikan peran kepada perempuan dalam ruang publik sambil tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya sebagai bagian dari identitas nasional.

Kata Kunci: *Masyarakat Madani, Kesetaraan Gender, Identitas Nasional, Sayid Ali Khamenei, Teo-Demokrasi.*

Introduction

Filsafat sebagai induk pengetahuan (Maksum 2006) sampai sekarang menjadi disiplin yang unik dan menarik dikaji, sering disebut sebagai nadi kehidupan yang sehat. Sejatinya filsafat hadir sebagai jawaban atas kemaslahatan hidup bersama. Oleh karena itu, filsafat menjadi fenomena eksistensial dalam kehidupan. Socrates

muncul di tengah masyarakat sebagai pengagum kebijaksanaan dalam menentang derasny arus kaum Sopis yang menyebarkan gagasan-gagasan tidak sehat dalam benak masyarakat (Yazdi 2021). Perkembangan berikutnya terkait hidup bersama filsuf muncul dalam menjawab persoalan riuh politik di Athena kala itu (Andariati 2020).

Filsafat mencerminkan spektrum kehidupan manusia. Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup bersama, diperlukan suatu wadah ideal yang dapat menjadi tempat bernaung bagi masyarakat. Sebagai jawaban imbas dari kisruh politik Athena, beberapa filsuf menawarkan model dan bentuk negara. Plato menawarkan negara ideal yang dikenal dengan sebutan “Republik Plato”, yakni sebuah negara yang dipimpin oleh seorang filsuf. Sementara itu, Aristoteles memandang negara sebagai hasil dari individu-individu yang membentuknya, dengan berbagai model yang disepakati bersama, yang dikenal dengan konsep *Zoon Politicon* (manusia sebagai makhluk politik). Baik Plato maupun Aristoteles, dalam pemikiran politik mereka tentang kepemimpinan, sepakat bahwa pemimpin ideal adalah seorang filsuf dengan jiwa yang suci, sehingga mendekati karakter seorang nabi (Said 2019).

Kemaslahatan hidup bersama dipengaruhi banyak faktor antara lain sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, diperlukan suatu wadah hidup bersama yang ideal untuk dihuni. Terlepas dari bentuk negara, terdapat satu poin yang bersifat universal dalam terbentuknya suatu negara, yaitu keberadaan masyarakat atau kumpulan individu yang menjadi penghuninya. Masyarakat merupakan unsur syarat kedua setelah unsur wilayah terpenuhi untuk terbentuknya negara, bahkan Lintje dalam bukunya meletakkan rakyat pada urutan pertama terbentuknya negara dan kedua wilayah (Marpaung 2018). Maka, ketiadaan masyarakat dalam suatu wilayah yang ingin hidup bersama dalam sepenanggungan mengakibatkan tidak terbentuknya suatu negara.

Diketahui bahwa negara yang baik ialah negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah rakyatnya

(Republik Indonesia n.d.) atau menjamin keharmonisan hidup bersama dalam kemajemukan bernegara. Hal ini senada dengan doktrin egalitarianisme. Egalitarianisme secara substansi disebut Nurcholis Majid sama dengan demokratis. Sisi lain egalitarianisme merupakan paham yang berpandangan akan kesetaraan atau adanya derajat yang manusia, meskipun dengan kelas sosial masing-masing, namun ialah relatif sama (Ritaudin 2012).

Kemajuan zaman selalu mengalami gesekan dalam lini kehidupan seperti benturan terhadap nilai agama, budaya, sosial dan lain sebagainya. Dalam konteks konstruksi sosial masyarakat, belakangan ini muncul gerakan kesetaraan gender, yang dipengaruhi oleh paham feminisme, emansipasi, dan lain sebagainya, dengan landasan hak asasi manusia. Terlepas dari asal-usul dan permasalahannya, saat ini berbagai pendekatan digunakan untuk merespons fenomena tersebut, salah satunya melalui konsep civil society atau masyarakat madani, yang merujuk pada masyarakat yang maju dan beradab. Thomas Paine yang dikutip oleh Puji Kurniawan menyebutkan bahwa civil society merupakan ruang di mana masyarakat sebagai penghuni dapat mengembangkan potensi yang menjunjung kebebasan tanpa paksaan (Kurniawan 2018).

Adapun konsep masyarakat madani sebagai sandingan disinyalir sebagai masyarakat maju yang beradab dari sebuah negara modern masa kini. Sebagai pemenuhan kemaslahatan hidup umat dalam suatu negara tidak terlepas dari isu di atas yaitu persoalan kesetaraan atas hak asasi. Memasuki wilayah Timur, persoalan kesetaraan gender yang hadir dari konstruksi sosial menimbulkan respon yang berbeda-beda, baik optimis maupun pesimis. Adapun perbedaan pada negara Republik Islam Iran yang agamis; perempuan yang sukar diasumsikan dengan domestik tidak sepenuhnya diterima karena terlihat adanya andil perempuan dalam upaya revolusi Republik Islam Iran (Mikail 2015).

Sepeninggal Ayatullah Khomeini yang ditetapkan Konstitusi Republik Islam Iran sebagai pemimpin, berdasarkan faktor kecakapan

dan memenuhi syarat serta pertimbangan matang, maka Sayid Ali Khamenei terpilih menjadi Rahbar (Pemimpin Tertinggi). Konstruksi sosial terkait peranan perempuan dalam ruang publik Sayid Ali Khamenei mengambil sikap setuju, dapat kita lihat sikap tersebut dengan tidak mempermasalahkan andil perempuan dalam merebut revolusi Islam. Sayid Ali Khamenei memahami negara dapat berdiri atas sepenanggungan masyarakat untuk hidup bersama, termasuk juga perempuan. Hal ini nampak pada masa Rasulullah saw. di mana perempuan ikut dalam perang. Maka, dalam keterbatasan tertentu, tidak heran perempuan Iran mempunyai hak suara dan menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan (Juwita 2021). Penulis melihat hal ini sebagai bentuk kesepahaman Ali Khamenei sebagai Rahbar yang menjalani sekaligus mengontrol jalannya negara.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil'ālamīn. Melalui pembelajaran, umat Islam tidak hanya diajarkan bagaimana cara percaya tapi juga berpikir terhadap kepercayaan tersebut. Melalui kecerdasan akal, muslim menggali ayat-ayat terkait persoalan kesetaraan dalam kehidupan bernegara, dinilai adanya kesamaan atas hak asasi semua manusia baik laki-laki maupun perempuan; melainkan sebagai makhluk Tuhan dibedakan atas ketakwaan. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Hujarāt [49]:13, berikut terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”
(Kementerian Agama n.d.)

Upaya kesetaraan yang diperjuangkan oleh perempuan bukan sekadar dorongan ego untuk tampil di ruang publik atau sebagai tandingan bagi laki-laki, melainkan bagian dari konstruksi sosial

dalam keragaman peradaban. Dalam sebuah perkuliahan Filsafat Politik Islam, dijelaskan bahwa pemberdayaan perempuan juga berkaitan erat dengan keamanan negara, yaitu dalam upaya menjaga agama, budaya, dan bangsa (Shahab 2023). Tidak kalah penting bahwa perempuan dalam ruang publik merupakan bentuk keadilan atas hak manusia akan sosial suatu negara. Kehadiran perempuan dapat memengaruhi dan menjadi pertimbangan kebijakan publik berdasarkan nilai feminin dan maskulin. Dalam konteks negara yang condong pada sistem patriarki dan cenderung membatasi perempuan pada peran domestik, munculnya kesetaraan sosial dapat secara bertahap mengurangi eksploitasi terhadap perempuan.

Gerakan kesetaraan merupakan upaya untuk menciptakan kehidupan harmonis, maju, beradab, toleran, dan demokratis yang telah dijamin negara. Cita-cita hidup sepenanggungan bersama tersebut disinyalir sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang madani dalam wadah hunian ideal atau negara. Masyarakat madani dalam beberapa literatur menyebutkan suatu rujukan kepada kota Madinah yang dipimpin oleh Rasul dahulunya. Nurcholis Majid melalui Nurdiah menyebutkan bahwa masyarakat madani dibedakan atas tiga unsur, yakni: agama, peradaban dan kota (Muhammad 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi fokusnya pada pengaruh kualitas individu Sayed Ali Khamenei terhadap identitas nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat madani di tengah isu kesetaraan gender. Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan kunci: Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Apa itu masyarakat madani? Bagaimana identitas nasional Republik Islam Iran terdefiniskan? Bagaimana kualitas individu Sayid Ali Khamenei dapat dianalisis dalam konteks ini?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang kesetaraan gender, memahami konsep masyarakat madani, mengidentifikasi ciri-ciri identitas nasional Republik Islam Iran, dan

mengevaluasi kualitas individu Sayid Ali Khamenei. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti dalam kajian tentang masyarakat madani dan peran kepemimpinan dalam memengaruhi identitas nasional di tengah dinamika kesetaraan gender.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis termotivasi untuk meneliti lebih dalam bagaimana masyarakat madani bisa terwujud di tengah isu kesetaraan gender dengan melihat pengaruh kualitas individu Sayid Ali Khamenei terhadap identitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kepemimpinan Khamenei dalam usaha menciptakan sebuah masyarakat yang inklusif dan beradab.

Dalam penelitian ini, akan dijawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti: Apa itu kesetaraan gender? Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Bagaimana karakteristik identitas nasional Republik Islam Iran? Bagaimana pengaruh kualitas individu Sayid Ali Khamenei terhadap aspek-aspek tersebut?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesetaraan gender, memperdalam konsep masyarakat madani, menjelaskan ciri-ciri identitas nasional Republik Islam Iran, serta menilai pengaruh kepemimpinan Sayid Ali Khamenei terhadap elemen-elemen ini. Diharapkan, hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi penting pada literatur akademik, terutama dalam studi tentang masyarakat madani dan peran kepemimpinan dalam membentuk identitas nasional di tengah dinamika kesetaraan gender.

Penelitian kualitatif ini berjenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu melihat literatur sebagai sumber data dan informasi yang berkesesuaian dengan bahasan yang ditulis (Hadi 1999). Data dan informasi yang diperoleh, diolah dengan analisis kritis melalui pendekatan analisis kualitas individu terhadap identitas nasional; yakni dengan melihat kebijakan, pemahaman dan fatwa-fatwa dari literatur terkait bahasan yang ditulis. Kemudian tulisan ini penulis

sajikan dengan deskriptif atau penggambaran yang jelas terhadap bahasan yang dikaji.

Kajian Pustaka

Penelitian terkait yang relevan dengan studi ini meliputi beberapa karya penting. *Pertama*, skripsi Rahmadi Pratama Aritonang dari Universitas Airlangga tahun 2019 dengan judul “Operasi Siber Ofensif Iran terhadap Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi: Kepentingan dan Strategi Siber Ofensif Iran” (Aritonang 2019). Penelitian deskriptif ini dikaji dengan pendekatan kualitas identitas nasional berdasarkan sejarah politik dan militer Iran serta kualitas individu kebijakan Ali Khamenei. Penelitian yang dilakukan Rahmadi ini mendapatkan hasil bahwa kebijakan siber ofensif yang dilancarkan Iran melalui kebijakan Ali Khamenei diakomodasi sebagai siber ofensif asimetris yang berguna untuk pencegahan aktif, sehingga dapat melemahkan keinginan musuh kepada konvensional dengan cara mengganggu, meletihkan, dan menghancurkan. Meskipun terdapat persamaan pada kualitas individu yang dilihat, namun penulisan ini melihat kualitas individu Ali Khamenei membangun Republik Islam Iran dalam menciptakan masyarakat madani di tengah isu kesetaraan gender.

Kedua, penelitian tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 oleh Moh Chairul Anam dengan judul “Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 dalam Perspektif Shirin Ebadi” (Anam 2022). Penelitian pustaka dengan pendekatan gender dan HAM yang dilakukan Moh Chairul ini mendapatkan hasil bahwa dalam kesetaraan, perempuan Iran sulit mendapatkan akses ruang publik, hal ini dilihat dari peran pergerakan sosio-politik, pendidikan, dan ekonomi. Moh Chairul dengan kacamata Shirin Ebadi menulis bahwa keminoritasan perempuan Iran dikarenakan kuatnya sistem patriarki dan tidak melibatkan suara perempuan dalam mengambil kebijakan. Kendati ada persamaan yang ingin dilihat dengan tesis Moh Chairul, namun penelitian ini lebih melihat kepada kesetaraan

gender sebagai upaya mewujudkan masyarakat madani sebagai kualitas individu Sayid Ali Khamenei atas identitas nasional.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ina Salmah Febriani dalam sebuah jurnal dengan judul “Keseimbangan Karakter Feminin dan Maskulin dalam Mewujudkan Masyarakat Madani” (Febriani 2021). Penelitian deskriptif pada jurnal Tsaqofah yang dilakukan Ina tersebut mendapatkan hasil bahwa manusia sebagai instrumen budaya dapat saling mewujudkan masyarakat madani dengan cara menyeimbangkan karakter maskulin dan feminin yang telah menjadi ketetapan Tuhan pada manusia. Kendati sama membahas masyarakat madani dengan penelitian Ina Salmah Febriani, namun penelitian ini melihat dari kualitas individu Sayid Ali Khamenei dalam kebijakannya sebagai identitas nasional Republik Islam Iran.

Keempat, skripsi Anis Shofiyah dengan judul “Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (Pra dan Pasca Revolusi 1979)” (Shofiyah 2019). Penelitian ini menggunakan metode sejarah: heuristika, verifikasi interpretasi, dan historiografi, serta menggunakan pendekatan sosiologis berupa gerakan sosial dan teori gender. Adapun hasil dari penelitian Anis Shofiyah yaitu: 1). Kondisi dan gerakan sosial perempuan Iran sebelum revolusi mengalami perubahan mulai dan gerakan perempuan Iran terlibat dalam wacana modernitas penguasa saat itu. 2). Kebijakan pemerintah Iran pasca revolusi juga berubah, masa Ayatullah Khomeini kebijakan merujuk pada syariat Islam dengan adanya keterbatasan dalam ruang publik terhadap perempuan dan setelah wafatnya Ayatullah Khomeini pembatasan terhadap perempuan dalam ruang publik mulai longgar. 3). Kendati dapat tekanan dari pihak konservatif, setelah revolusi Iran gerakan sosial perempuan Iran semakin terlihat, beragam upaya kesetaraan gender oleh perempuan Iran banyak disuarakan. Alhasil pada gilirannya perempuan banyak aktif dalam ruang publik juga pemerintahan Iran.

Terakhir, penelitian oleh Wahyu Hidayat dengan judul “Reaktualisasi Wilayahul Faqih (Tafsir Politik Sayyid Ali Khamenei)”

(W. Hidayat 2023). Penelitian deskriptif ini menggunakan metode analisis-kritis. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat yakni untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa reaktualisasi penerapan wilayatul faqih saat ini, sebelum dan sesudah revolusi Iran dari sudut pandang Sayid Ali Khamenei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Sayyed Ali Khamenei, penerapan wilāyat al-faqīh adalah sebuah teori yang mencerminkan identitas negara, sekaligus menjadi inti dari sistem Republik Islam Iran. Reaksi terhadap penerapannya beragam, baik dari pihak internal maupun eksternal, tetapi hal ini justru memperkuat fondasi sistem politik Iran sebagai negara yang berdasarkan prinsip Islam.

Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Madani

Perkembangan zaman seiring dengan berjalannya waktu; bergerak maju, teratur, tertib, dan tidak mengenal jeda. Manusia, dengan segala keunggulannya sebagai makhluk budaya, sejatinya diharapkan mengadopsi sikap optimis dalam menghadapi tantangan zaman. Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa setiap ayunan kaki ke depan menyisihkan sebelahny di belakang, artinya setiap gesekan kemajuan kerap kali meninggalkan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Seperti diketahui bahwa kemajuan zaman mendapati gesekan terhadap nilai agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Salah satu hal yang disoroti adalah munculnya keganjilan sebagai gesekan dalam kehidupan sosial bernegara. Meskipun negara terus berupaya menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya, tetap terdapat kekurangan yang belum sepenuhnya teratasi. Rochmawan yang dikutip Rahmat dalam tulisannya menyebutkan kemajuan peradaban pada kebutuhan manusia atas ketersediaan sangat beragam serta terus bertambah sejalan dengan waktu yang terus diperbarui (Gunawijaya 2017). Negara yang baik ialah negara yang mampu menjaga kestabilan hidup masyarakat negara tersebut. Hal ini tentu atas kecanggihan sistem pemerintah dalam mengatur

dan kesolidan masyarakat yang diatur. Kehidupan negara tidak dapat dipisahkan antara masyarakat dan pemerintah.

Keberagaman dalam kehidupan bernegara menghasilkan berbagai konstruksi sosial, salah satunya yang semakin menonjol belakangan ini adalah persoalan gender, yang patut diperhatikan secara bersama. Persoalan gender dalam kehidupan masyarakat sejatinya suatu peran nonkodrati. Dalam jurnal Al-Mayyiah yang ditulis oleh Rustan Efendy, *Women's Studies Encyclopedia* menyebutkan gender merupakan konsep kultural yang membedakan antara peran, perilaku, mental, dan karakter laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat (Efendy 2014). Demikian kita pahami bahwa gender dalam kemaslahatan hidup bersama ialah hak asasi, dengannya tidak tertutup ruang publik masyarakat negara.

Kehidupan sosial yang dinamis menjadikan perempuan akan hak asasi terkait gender hadir beragam gerakan kesetaraan gender atas paham feminisme dan semangat emansipatoris. Mengutip dari Yuni: gerakan kesetaraan gender berupa upaya untuk terwujudnya kesamaan perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan ruang publik seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya (Sulistiyowati 2020). Dewasa ini, gerakan kesetaraan sebagai asas hak asasi semakin mendapat perhatian, terutama di negara-negara demokrasi yang menjunjung kebebasan, partisipasi, dan aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, memerlukan unsur kesetaraan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan budaya akademis yang harmonis dan mendukung pencapaian tujuan yang tertuang dalam konstitusi. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan gender:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (Al-Hujarāt [49]:13) (Kementerian Agama n.d.).

“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Mumtahanah [60]:12) (Kementerian Agama n.d.).

“Orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lainnya. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Tawbah [9]:71) (Kementerian Agama n.d.).

Dalil di atas menegaskan bahwa manusia diciptakan Tuhan dari laki-laki dan perempuan yang dibedakan atas derajat takwanya. Perihal demikian dipahami adanya kesetaraan gender dengan sandingan antara laki-laki dan perempuan yang disinyalir memuat kehadiran peran antara keduanya. Mendengar penjelasan Nur Rofiah (Afridah 2020) dalam saluran KGI (Keadilan Gender Indonesia), bahwasanya laki-laki dan perempuan merupakan ciptaan Tuhan yang disemat dengan kata manusia. Al-Quran dalam menggambarkan manusia tersemat pada kata “*al-insān, al-nās, basyar*” serta semua kelompok manusia, baik negatif maupun positif, seperti orang-orang beriman, kafir, dan lainnya; terdapat padanya perempuan karena merupakan manusia.

Kutipan ayat Al-Qur'an tersebut juga memberikan isyarat mengenai kesetaraan gender, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk

sosial ditugaskan untuk saling menolong satu sama lain. Bahkan QS. Al-Mumtahanah ayat 12 menegaskan perempuan juga boleh berbaiat. Di sisi lain, di mata hukum Islam, betapa keadilan itu ditegakkan memberi sinyal kesetaraan gender. Suatu peristiwa yang kita ketahui bersama bahwa Rasul mengatakan jika seandainya Fatimah anaknya berbuat salah (dicontohkan dalam kasus mencuri) maka Rasul sebagai pemimpin sekaligus pemangku kebijakan hukum akan menegakkan keadilan pada Fatimah. Peristiwa ini setidaknya mampu menggambarkan bagaimana gambaran adil itu ditegakkan dalam Islam seperti yang dicitakan paham feminisme.

Kembali kepada negara sebagai tempat hunian bersama merupakan suatu sistem yang berupaya menjaga keharmonisan hidup bersama. Masyarakat sebagai poin sentral yang dibicarakan menjadi capaian kemajuan peradaban dituntut untuk meningkatkan sikap demokratis dan toleransi. Hal yang menarik mengatasi kehidupan sosial masyarakat dalam kemajuan zaman yang memuat beragam konstruksi sosial seperti kesetaraan gender; kita diperkenankan kepada konsep masyarakat madani atau *civil society*. Mengutip Zakiyuddin, *civil society* bukanlah konsep politik yang berupaya melawan negara, melainkan pola kehidupan masyarakat untuk saling menumbuhkan keharmonisan hidup sosial. Ferguson dan Smith melalui Zakiyuddin menuliskan bahwa *civil society* merupakan realitas kebebasan yang dianut masyarakat suatu negara yang mencerminkan produk rasional individu (Baidhawry 2016).

Konsep *civil society* sering disanding dengan konsep masyarakat madani dalam tradisi Islam karena faktor capaian, yaitu sama-sama ingin menciptakan kehidupan harmonis masyarakat melalui toleransi. Konsep masyarakat madani merupakan upaya melihat tatanan masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah saw. serta pemikiran filsafat politik Al-Farabi, yaitu *al-Madinah al-Fadilah*. Dawam melalui Nurdiah dalam tulisannya menyebutkan bahwa konsep masyarakat madani pertama kali dimunculkan kembali oleh mantan perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Nurdiah menuliskan masyarakat madani merupakan sistem sosial subur atas moralitas masyarakat untuk kebebasan dan kestabilan hidup bersama (Muhammad 2017). Ina mengutip Nurcholis menyebutkan kata ‘madani’ diadopsi dari kata ‘*Madīnah*’ dari asal kata ‘*Madaniyah*’ yang berarti berperadaban (Febriani 2021). Hal ini disinyalir sebagai masyarakat suatu kota yang maju pada tataran sosial dengan aspek toleransi, terbuka tanpa paksaan. Azyumardi berpendapat, masyarakat madani merupakan hajat bersama akan toleransi antara masyarakat berupa penerimaan terhadap beragam perbedaan dalam menciptakan kehidupan berkualitas (Muhammad 2017).

Adapun konsep *al-Madīnah al-Faḍīlah* sebagai basis masyarakat madani, Al-Farabi menyebut manusia sebagai hewan rasional butuh akan sosial dan berserikat sehingga terbentuk negara. Havis dan Achmad (Aravik and Hamzani 2019) dalam penelitiannya menyebutkan konsep *al-Madīnah al-Faḍīlah* ialah negara utama yang dibangun oleh masyarakat sosial cerdas, mampu menerapkan hidup rukun dengan sosialisasi dan toleransi. Fungsi negara utama ialah untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat baik semasa hidup di dunia maupun akhirat. Al-Farabi berpandangan bahwa *al-Madīnah al-Faḍīlah* dapat berjalan dikarenakan faktor pemimpin yang bijak seperti filsuf dalam memfasilitasi kebahagiaan masyarakat serta keberadaannya dapat mencerdaskan kehidupan umat.

Merujuk pada konsep *al-Madīnah al-Faḍīlah*, kebahagiaan dapat dicapai melalui kerukunan masyarakat yang difasilitasi oleh negara dengan mempromosikan toleransi tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan aspek lainnya, termasuk dalam hal konstruksi sosial seperti persoalan gender yang menjadi perhatian para pemimpin. Al-Farabi menyebut negara seperti kesatuan tubuh yang sehat, organ-organnya ialah masyarakat yang membangun satu sama lain untuk menjadi utuh. Penulis setuju perihal kata masyarakat seperti pemahaman Nur Rafiah terhadap kata manusia, yaitu suatu kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, tentu kita

diajak untuk menyepakati bahwa suatu negara yang harmonis ialah kebahagiaan masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk sosial.

Basis masyarakat madani juga terkait gambaran kondisi sosial masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah saw. Jika Al-Farabi menyampaikan selayaknya pemimpin seperti filsuf maka Rasul di sini adalah apa yang di atas filsuf. Menyikapi kehidupan sosial masyarakat khususnya Madinah yang condong patriarki, Rasul meletakkan standar yang mulia kepada perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Diketahui bersama bahwa kebiasaan masyarakat Timur yang merendahkan perempuan bahkan membunuh bayi perempuan terhapuskan semenjak kehadiran Rasul di tengah umat. Kesetaraan gender juga tergambar dari aktivitas publik seperti sosial-ekonomi yang diperankan oleh wanita, bahkan istri Rasul sendiri.

Meninjau tulisan Viky mengenai kesetaraan gender, terlihat bahwa pada masa Rasulullah saw., kesetaraan gender sudah mulai tampak, memberikan isyarat tentang kebolehan perempuan untuk berperan dalam ranah publik. Viky menyebutkan dalam sosial kemasyarakatan perempuan masa itu tampil dengan perawakan yang sopan, dinamis, dan akhlak yang baik. Bentuk kesetaraan gender di masa Rasulullah memimpin Madinah adalah perempuan hadir di berbagai sektor publik seperti sosio-ekonomi, bahkan terlibat dalam perang. Suatu hal kemudian memberitahu bahwa kesetaraan gender disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa perempuan sebagai sosok yang memiliki kemandirian politik seperti Ratu Balqis (Mazaya 2014).

Kenyataan yang diterima terhadap masyarakat madani mengingat keperluan dari kepenulisan ini yaitu merupakan suatu sistem masyarakat maju dan toleransi terhadap berbagai lini sosial kemasyarakatan termasuk konstruksi sosial seperti kesetaraan gender dengan tetap menjaga nilai agama, sosial, dan budaya. Perwujudan masyarakat madani diharapkan melahirkan peradaban bangsa dengan keharmonisan antar individu masyarakat di suatu negara yang dipimpin oleh seorang bijak dalam mencapai

kebahagiaan masyarakatnya, serta mampu mengatasi segala gesekan terhadap kemajuan zaman.

Adapun Republik Islam Iran merupakan negara demokratis pasca revolusi Islam. Negara Iran menetapkan Islam sebagai basis negara melalui referendum dengan konsep *Wilāyat al-Faqīh* yang dipimpin oleh Fakih. Adapun sistem pemerintahan Iran sama dengan negara Modern umumnya yaitu menganut sistem Trias Politica, namun dalam penerapannya bertanggung jawab kepada seorang Fakih atau pemimpin tertinggi di negara tersebut. Terkait negara Islam, Iran bersama seluruh lembaga negara dalam menjaga keharmonisan hidup bersama menerapkan nilai sosial keislaman supaya terbentuk kemandirian masyarakat seperti masyarakat kota Madinah yang dipimpin oleh Rasul.

Keberlangsungan hidup bersama yang harmoni di tengah tantangan zaman dan konstruksi sosial dan tidak mengesampingkan nilai agama dan budaya dapat disebut dengan kehidupan madani. Poin penting sebagai basis masyarakat madani, Al-Farabi menyoroti kepada masyarakat yang cerdas dan pemimpin yang bijak. Hidup bernegara ialah upaya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemimpin yang bijak dalam menyikapi perkembangan zaman dan kehidupan bersama akan menciptakan kebahagiaan serta berkontribusi pada peningkatan kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kualitas kepemimpinan Sayid Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi Iran, dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih maju di tengah arus zaman, dengan fokus pada aspek konstruksi sosial, seperti kesetaraan gender.

Hasil Pembahasan

Identitas Nasional Republik Islam Iran

Republik Islam Iran, atau yang dahulu kenal sebagai Persia, merupakan negara yang menduduki tiga wilayah Asia, yakni; Asia

Barat, Tengah dan Selatan, sekaligus menjadi bagian Timur-Tengah dengan keberadaan antara Turki dan Irak di sebelah Barat dan sebelah Timur antara Pakistan dan Afghanistan. Iran merupakan negara terluas kedua Timur Tengah dan luas menduduki posisi ke 17 dunia. Sebagian besar wilayah Iran berupa pantai dengan 400 mil menjulur sepanjang Laut Kasvia Selatan dan sisanya 1.100 mil sebelah Utara pada Teluk Oman dan Teluk Persia. Melalui Anis tercatat pada 23 Desember 2018 penduduk Republik Islam Iran terdiri dari 81 Juta jiwa dan menempati peringkat terpadat 18 dunia (Shofiyah 2019).

Perjalanan Persia mengalami perubahan signifikan seiring dengan pergantian pemimpin, termasuk ketika Reza Pahlavi menggantikan ayahnya, Shah Reza. Pada tahun 1935, di bawah pemerintahan Shah Reza, nama Persia diubah menjadi Iran, sebagai bagian dari upaya modernisasi negara (Shofiyah 2019). Rezim Pahlavi, terutama pada masa pemerintahan Shah Reza, dikenal dengan tindakan represif terhadap berbagai lapisan masyarakat, khususnya ulama, yang merasa tertindas. Ketidakpuasan ini diperburuk dengan kondisi sosial ekonomi yang sulit, terutama bagi perempuan, di mana akses pendidikan dan kesempatan sosial sangat terbatas. Selain itu, sejumlah ulama diasingkan dari Iran sebagai bentuk pembungkaman terhadap oposisi terhadap rezim tersebut.

Faktor ketidakpuasan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Iran di bawah rezim Pahlavi menjadi pemicu gerakan yang menuntut revolusi. Revolusi sendiri dalam KBBI menunjukkan arti: perubahan ketatanegaraan atau perubahan yang mendasar (KBBI Online n.d.). Ulama pada gerakan ini menjadi garda terdepan bersama tokoh politik serta andil perempuan yang mengambil sikap dengan bersama-sama berunjuk rasa untuk revolusi Islam Iran. Satu hal yang menarik adalah bahwa ketidaknyamanan terhadap rezim yang berkuasa menjadi penyebab terjadinya revolusi, yang berfungsi sebagai ajang untuk mengembalikan rasa keharmonisan hidup bersama serta identitas bangsa dan negara. Hal ini dapat diartikan sebagai keinginan menuju kehidupan madani; toleransi

dan harmonis tanpa melunturkan agama, budaya, sosial, dan lainnya bersamaan dengan zaman.

Iran, sebagai negara Islam, tidak hanya dibentuk oleh peran ulama yang berada di garis depan revolusi, tetapi juga oleh semangat revolusioner untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dalam sebuah negara yang ideal. Meskipun demikian, peran ulama tetap menjadi faktor utama dan inspirator. Ayatullah Khomeini, sebagai pemimpin revolusi, bersama rakyat Iran, sepakat untuk membentuk negara yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan aspirasi masyarakat. Melalui referendum yang diadakan pada tanggal 29-30 Maret 1979, Iran secara resmi menetapkan diri sebagai Republik Islam Iran. Hasil referendum tersebut menunjukkan dukungan mayoritas, dengan 98,2 persen pemilih setuju dengan pembentukan negara ini, yang kemudian diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Islam Iran Pasal 1 (Irnaningsih 2008).

Keberhasilan Revolusi Islam Iran adalah suatu kemenangan nyata dan pada tahap berikutnya para cendekiawan mencari kata sepakat untuk negara sebagai hunian ideal seluruh masyarakat Iran. Negara Iran yang sebelumnya berideologi sekularisme akhirnya berideologi teo-demokrasi dengan sistem *Wilāyat al-Faqīh* (Anam 2022). *Wilāyat al-Faqīh* adalah sebuah sistem negara yang dipimpin oleh ulama yang bertanggungjawab menjalankan sekaligus mengawasi jalannya negara. Adapun *Wilāyat al-Faqīh* dipimpin oleh seorang Fakih, yaitu Pemimpin Tertinggi (Rahbar).

Wilāyat al-Faqīh berakar pada ideologi teo-demokrasi di mana otoritas tertinggi dalam negara dipahami berasal dari Tuhan, kemudian diteruskan kepada Nabi, Rasul, dan dilanjutkan dengan Ahlulbait yang terdiri dari 12 Imam, dan terakhir diisi oleh Fakih sebagai wakil Imam Maksum (Irnaningsih 2008). Melihat siklus demikian dan kita sandingkan dengan *al-Madīnah al-Faḍīlah* sebagai basis masyarakat madani bahwa pemimpin benar-benar pilihan yang tepat sebagai orang yang cerdas dan dengannya mencerdaskan

masyarakat serta sebagai penjamin keharmonisan hidup bersama suatu negara.

Wilāyat al-Faqīh sendiri disebut oleh Sayid Ali Khamenei dalam *Muntakhab al-Aḥkām* yaitu suatu kepemimpinan masyarakat Islam pada urusan sosial umat Islam di setiap zamannya (Khamenei 2021). Sisi lain dari Republik Islam Iran sebagai negara demokrasi menganut sistem pemerintahan *trias politica*, yakni suatu sistem yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga kelompok bagian ini bertanggung jawab dan jalannya diawasi oleh wali fakih yang bertindak sebagai pemimpin. Suatu hal tentang Fakih termaktub dalam *The Wisdom* (kumpulan fatwa dan pidato Ali Khamenei) (Khamenei 2008) bahwa pada prinsip politiknya berakar dari kehendak rakyat.

Berdasarkan kehendak rakyat, kebijakan seorang Fakih harus mencerminkan kepentingan yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan harmonis atau kemadaniaan masyarakat sebagai makhluk sosial. Hal ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara rakyat dan pemimpin melalui prinsip demokrasi dan toleransi. Adakah pemimpin demikian? Terlepas dari keterbatasan, jawabannya dibuktikan dengan keberadaan Ayatullah Khomeini dan Sayid Ali Khamenei. Dengan kemampuan kualitas individu terhadap identitas nasional dua Imam tersebut telah ditetapkan oleh Dewan Ahli Fakih sebagai Fakih. Mengingat kualitas prima tentu seorang Fakih bukan sembarangan, melainkan memiliki pengetahuan agama dan negara yang kuat. mengutip dari Irnaningsih, bahwasanya terdapat beberapa syarat untuk menjadi seorang Rahbar, yaitu:

1. Keilmuan, sebagaimana yang dituntut bagi tugas-tugas Mufti (pemberi fatwa) dalam berbagai bidang fikih.
2. Adil dan bertakwa, sebagaimana yang dituntut bagi kepemimpinan umat Islam.
3. Memiliki wawasan politik dan sosial, bijaksana, berani, mampu dalam pemerintahan, dan cakap dalam kepemimpinan (Irnaningsih 2008).

Keberadaan yang sah dan berdaulat dari Republik Islam Iran, beserta sistem pemerintahan yang dibentuk, sebagaimana diuraikan di atas, membawa penulis pada capaian utama tulisan ini. Penulis akan mengkaji kualitas individu Rahbar, Sayid Ali Khamenei, dalam konteks identitas nasional serta perannya dalam mewujudkan masyarakat madani di tengah arus zaman yang mencakup konstruksi sosial terkait kesetaraan gender.

Identitas Nasional Sayid Ali Khamenei

Iran disebut sebagai negeri para Mulla selalu mendapat perhatian dunia terlebih pasca Revolusi Islam. Perhatian yang mengidap ketakutan akan kejayaan Islam bukan saja dalam persoalan politik dunia, namun sampai kepada fatwa dan pidato pemimpin Iran menjadi perhatian tersendiri (Khamenei 2008). Sayid ali Khamenei merupakan salah satu tokoh perjuangan revolusi Islam Iran bersama para ulama, politikus dan elemen masyarakat, lahir pada 19 Juli 1939 di Masyhad, provinsi Khorasan dan sekarang berusia 83 Tahun (W. Hidayat 2023). Sepeninggal Komandan Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khomeini, Sayid Ali Khamenei melalui Dewan Ahli Rahbari yang dikenal dengan Majlis-e Khubregan-e Rahbari terpilih menjadi Fakih atau Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran menggantikan Ayatullah Khomeini. Dewan Ahli Rahbari atau Majlis-e Khubregan-e Rahbari merupakan dewan ahli yang diisi oleh ulama senior yang mengetahui seluk beluk kepemimpinan dalam Islam dan bertugas untuk memilih seorang Rahbar. Adapun keanggotaan ini secara demokratis dipilih langsung oleh rakyat.

Melansir dari Ensiklopedia Dunia, Sayid Ali Khamenei merupakan pemimpin tertinggi yang kedua sekaligus pemimpin pasukan bersenjata Republik Islam Iran yang ditetapkan secara konstitusional pada pasal 107 dan 110 Undang-undang Republik Islam Iran. Sayid Ali Khamenei memulai jabatan sebagai Fakih pada tanggal 4 Juli 1989. Sebelum menjabat kedudukan tersebut, Sayid Ali Khamenei juga pernah menduduki posisi Presiden Ketiga Republik

Islam Iran selama dua periode yang dimulai pada 13 Oktober 1981 dan berakhir pada 3 Agustus 1989. Sayid Ali Khamenei di samping sebagai politikus juga sebagai seorang ulama, hal demikianlah yang menjadikannya sebagai Imam tetap Salat Jumat di Tehran sekaligus menjadi direktur Yayasan Ensiklopedia Islam (Ensiklopedia Dunia n.d.).

Sayid Ali Khamenei memulai perjalanan politiknya semasa remaja. Menurut Sayid Ali Khamenei sendiri perjalanan politiknya disebabkan percikan api perjuangan Navvab Safavi dan dilanjutkan dengan mengenal Ayatullah Khomeini. Perjalanan politik Sayid Ali Khamenei tidak begitu mulus dengan sampai enam kali dimasukkan ke dalam penjara oleh rezim yang berkuasa. Secara jelas perebutan Iran untuk menjadi negara Islam merupakan pengabdian seorang hamba Allah dengan semangat revolusioner, begitu pula dengan Sayid Ali Khamenei. Sisi lain pengalaman politik Sayid Ali Khamenei secara terbatas dapat diketahui akan apa yang diembannya, yaitu seperti menjadi komite penyambutan Ayatullah Khomeini dari Paris, Menteri Pertahanan Negara, Ekspeditor Provinsi Sistan Baluchestan, Pemimpin Pasukan Pengawal Revolusi, Anggota Parlemen, Presiden ketiga dan terakhir sampai sekarang menjadi seorang Fakih (M. Hidayat and Umam 2004).

Ali Khamenei merupakan seorang Fakih, yaitu orang yang ahli dalam bidang fikih. Adapun karya monumentalnya terkait fikih yaitu *Muntakhab al-Aḥkām* (Khamenei 2021). Sayid Ali Khamenei dikenal sebagai pemuda yang cerdas, selain menguasai fikih yang dipelajarinya selama tiga kuartal, bentuk kemahirannya dalam bidang tersebut juga tidak lepas dari perempuan; yakni dalam *Muntakhab al-Aḥkām*, Sayid Ali Khamenei memasukkan subbab terkait fikih perempuan. Adapun disiplin lain yang digeluti Sayid Ali Khamenei yaitu bidang sejarah dan sastra. Alih-alih seorang Fakih sebagai akademisi sampai sekarang Sayid Ali Khamenei masih aktif mengajar ilmu fikih kepada ulama pada tingkat Bahtsal Kharij atau tingkat tertinggi akademis Iran di Hauzah Ilmiah (M. Hidayat

and Umam 2004). Iran berupaya menebarkan kehidupan islami di tengah masyarakat seperti kepemimpinan Rasul di Madinah. Terkait konstruksi sosial seperti persoalan gender yang menuntut akan kesamaan kesempatan peran tertentu dalam lingkup sosial. Islam memiliki standar kemajemukan yang telah diatur dalam al-Qur'an.

Mewujudkan Masyarakat Madani atas Kesetaraan Gender

Revolusi Islam Iran merupakan upaya bersama untuk menjemput kembali kehidupan harmonis dan berkemajuan. Gerakan yang dipelopori oleh ulama dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan, mencerminkan rasa solidaritas dalam mencapai hunian ideal, yaitu negara. Diketahui bahwa sebelum revolusi Islam, rakyat Iran sangat merasa tertindas oleh rezim yang berkuasa, hal yang begitu kentara ini merupakan semangat rezim sekuler dan kapitalis sehingga memaksa masyarakat Iran dalam bayang-bayang feodalisme; terlebih para ulama, diboikot dan sampai mengalami pengasingan ke luar Iran dengan dalih untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan.

Fakih yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan bersama oleh masyarakat Iran dalam rangka mencapai keharmonisan, Sayid Ali Khamenei, menyatakan bahwa capaian politik yang ingin diwujudkan oleh seorang Fakih adalah mencerminkan kehendak masyarakat. Keharmonisan hidup masyarakat Iran oleh Sayid Ali Khamenei dapat dilihat pada kecakapannya melalui kebijakan operasi siber ofensif kepada musuh Iran yaitu Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi. Upaya menjaga kehidupan masyarakat tetap damai nyaman dan tenteram, pada penggunaan siber ofensif Sayid Ali Khamenei sama sekali tidak ingin melukai lawan-lawannya, di mana Amerika Serikat dan Israel lebih maju dan memahami persoalan siber. Maka, untuk menjaga kedamaian hidup masyarakat Iran, Sayid Ali Khamenei pada operasi siber ofensif berupaya mencari kedamaian dengan melemahkan niat lawannya untuk tidak mengusik, melawan apalagi menghancurkan Iran (Aritonang 2019).

Kehidupan sosial dengan konstruksinya seperti kesetaraan gender merefleksikan suatu asumsi bahwa perempuan merupakan identitas suatu negara. Sayid Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran berupaya menjaga keharmonisan hidup dengan menjaga identitas negaranya. Senada dengan Umar Shahab; bahwasanya pemberdayaan perempuan oleh negara merupakan bentuk pertahanan negara dari serangan luar seperti nilai-nilai budaya. Lebih lanjut, sebagai refleksi perihal perempuan dan negara, penulis mengajak untuk melihat kisah Nizar Qobbani. Penyair cinta dan perempuan ini dituding atas identitas nasionalnya sebagai sosok yang naif dengan syair-syairnya dan sama sekali tidak berkontribusi kepada negara dalam kepenyairannya, namun Nizar menyampaikan bahwa perihal cinta dan perempuan pada syair-syairnya merupakan identitas nasionalnya terhadap bangsa yang dapat disinyalir dari sisi feminin (Qobbani 2021).

Sisi lain sebagai Fakih yang menjalani dan mengontrol jalannya pemerintah, Sayid Ali Khamenei juga secara tidak langsung diamanahkan untuk mewujudkan cita-cita Republik Islam Iran yang tercantum dalam konstitusi; bahwa terdapat paragraf khusus yang membahas tentang perempuan. Adapun paragraf tersebut dalam "The Constitution of the Islamic Republik of Iran", melalui Jaja Juwita berbunyi sebagai berikut: "Dalam membangun fondasi Islam, semua elemen manusia yang selama ini menjadi korban eksploitasi asing harus meraih kembali identitas asli dan hak asasi mereka. Dalam memenuhi ini, sudah selayaknya wanita menerima porsi yang lebih besar terkait pemurnian hak mereka, karena rezim lama mereka menderita operasi yang lebih besar". Iran juga menetapkan beberapa ketentuan mengenai peran perempuan dalam masyarakat, yang tercermin dalam kebijakan pemerintah, antara lain:

1. Menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan kepribadian perempuan dan pengembalian hak-hak mereka, baik materi maupun immateri.

2. Melindungi para ibu, khususnya selama kehamilan dan melindungi anak- anak yang tidak memiliki wali.
3. Menetapkan peradilan yang kompeten untuk melindungi dan menjaga keutuhan keluarga.
4. Menetapkan jaminan khusus bagi para janda, wanita lanjut usia, dan wanita yang tidak memiliki sandaran.
5. Menyerahkan pengasuhan anak yang tidak memiliki wali sah kepada ibu yang layak demi melindungi kepentingan anak tersebut (Juwita 2021).

Menanggapi hal tersebut, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat madani adalah dengan pemberdayaan perempuan sebagai bagian masyarakat sosial. Sayid Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi Iran, memainkan peran penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai Rahbar, Khamenei menunjukkan kecakapan dalam menjaga integritas naskah konstitusi Iran, dengan tidak menggantinya, melainkan mengupayakan implementasi yang lebih baik. Dengan sikap ini, ia menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam konstitusi dan berusaha mewujudkannya, termasuk dalam hal pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan sosial.

Upaya tersebut merupakan langkah penting menuju masyarakat madani dengan kesetaraan gender, mengakui keberadaan perempuan dalam lingkup sosial. Sayid Ali Khamenei menekankan bahwa perempuan, baik di kota maupun desa, memainkan peran penting dalam revolusi Islam dan memiliki hak publik yang setara dengan laki-laki. Sayid Ali Khamenei menyebutkan dalam pidatonya; bahkan perempuan mempunyai semangat dan kecerdasan tersendiri dalam ruang sosial kenegaraan yang patut diberi apresiasi (Leader.ir 2013).

Dari perspektif *al-Madinah al-Faḍīlah* sebagai dasar masyarakat madani, terdapat dua sisi peran dalam satu negara yang dimainkan oleh pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang cerdas dapat mencerdaskan masyarakat yang dipimpin, menciptakan sinergi

dalam substansi. Meskipun sinergi ini seringkali tampak samar dalam bentuknya dan sulit diukur dalam energi yang dihasilkan. Rocky Gerung menyebutkan pemimpin harus cerdas, bahkan untuk menjamin adanya kesejahteraan sosial kecerdasan seorang pemimpin harus dapat mengakurasikan mulai dari rahim perempuan (Gerung and Arief 2023). Perwujudan masyarakat madani oleh Sayid Ali Khamenei terkait dengan konstruksi sosial dan kesetaraan gender dapat dilihat melalui peneladanannya terhadap kepemimpinan Rasulullah saw. di Madinah. Rasulullah memuliakan perempuan, tidak diskriminatif, dan mengakui peran penting perempuan dalam ruang publik, sebagai cerminan kesetaraan gender pada masa itu. Sebagai contoh nyata, Sayid Ali Khamenei menetapkan hari kelahiran Fatimah binti Rasulullah sebagai Hari Perempuan dan Ibu Republik Islam Iran, sebagai bentuk penghargaan terhadap peran perempuan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan (ParsToday 2021).

Perempuan di Iran, baik sebelum maupun sesudah revolusi, memainkan peran aktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Seiring dengan perkembangan zaman, sebagai bagian dari masyarakat yang diciptakan oleh Allah Swt., kedudukan dan hak asasi setiap individu, termasuk perempuan, harus dimuliakan. Ini ditambah dengan pentingnya konstruksi sosial terkait isu kesetaraan gender. Musdah Mulia, melalui Moh Chairul, menyatakan bahwa Islam pada hakikatnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang menekankan kesetaraan dan persatuan umat (Anam 2022). Iran, berdasarkan nilai-nilai Islam, menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia dengan peran yang sesuai dengan koridor Islam. Capaian perempuan muslim diharapkan dapat maju, beradab, berakhlak, serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Sayid Ali Khamenei dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa solusi dari kebobrokan pikiran terhadap pemberdayaan perempuan ialah kembali kepada nilai Islam yang tertera pada Al-Qur'an. Kesetaraan gender sebagai langkah menuju masyarakat madani, menurut Sayid Ali Khamenei, mendukung keterlibatan perempuan dalam berbagai

ruang publik, seperti sosial, politik, dan pendidikan. Namun, prinsip pemberdayaan perempuan ini harus tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan kemuliaan serta martabat perempuan itu sendiri (Leader.ir 2013).

Kata yang perlu digarisbawahi perihal kesetaraan gender ialah peran. Perempuan dalam kesetaraan gender memiliki peranan tersendiri dalam Islam. Tidak hanya diberikan tempat, melainkan begitu dimuliakan. Hal ini menjadi pembeda sekaligus keistimewaan perempuan muslim dari kesetaraan gender pada umumnya; yaitu peran sosial tanpa mengurangi nilai agama dan budaya Islam. Sebagai contoh dari klaim ini, dapat dilihat bagaimana dinamika sosial dalam ranah publik, di mana Sayid Ali Khamenei menetapkan agar perempuan Iran tetap mengenakan hijab sebagai bentuk penghormatan dan nilai spiritual bagi diri mereka. Upaya ini sejalan dengan Fakih Iran pertama, yaitu Ayatullah Khomeini dalam pidatonya yang menyampaikan pentingnya hijab bagi perempuan muslim sehingga suatu kelak akan menjadi contoh dunia dalam sosial budaya perempuan muslim (Mikail 2015).

Iran, sebagai negara yang agamis, memiliki standar tertentu dalam penerapan kesetaraan gender. Perempuan Iran, layaknya perempuan muslim, diletakkan pada posisi mulia dalam peranannya, baik domestik maupun publik, dan diupayakan negara melalui persetujuan Rahbar. Hal ini dikarenakan Rahbar menjalankan sekaligus mengawasi jalannya negara. Suatu kebijakan publik ditetapkan melalui kesepakatan Rahbar. Andria dan Dzulfikar menyebut misal terdapat kekosongan hukum di tengah masyarakat, Iran mengembalikan kebijakan kepada Rahbar (Marchelia and Ali 2022). Dewasa ini, pemimpin tertinggi Iran dianggap sebagai figur yang kuat dalam menjaga identitas nasional yang ditegaskan oleh Dewan Fakih. Dalam konteks ini, kehidupan masyarakat Iran, khususnya perempuan, dapat mencapai kebahagiaan sebagai bagian dari masyarakat sosial yang maju, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Islam, baik secara individu maupun kolektif (Riza 2017).

Kemajuan zaman dengan dinamika sosial menghadirkan beragam pergerakan. Terlihat beberapa unjuk rasa LSM perempuan Iran menyuarakan haknya. Gerakan ini menuntut keterbukaan dengan mendapatkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup publik sebagai makhluk sosial. Semangat emansipatoris dari kalangan perempuan Iran menegaskan bahwa kemuliaan perempuan yang dihadapkan dengan perubahan zaman tidak lagi harus terkungkung di ruang domestik, melainkan harus diberi ruang di publik. Kebijakan publik, dalam hal ini, seharusnya tidak diskriminatif atau malah mengeksploitasi perempuan. Dengan demikian, gerakan feminisme dan emansipasi menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender adalah hak asasi yang tidak boleh dibatasi, mencakup peran, karakter, dan pilihan dalam ruang publik. Identitas nasional Republik Islam Iran, di bawah kepemimpinan Sayid Ali Khamenei, berupaya mewujudkan masyarakat madani dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif di ruang publik, sembari menjaga kemuliaan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan yang diambil tetap berlandaskan koridor Islam, yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh peran publik tanpa mengabaikan harkat dan martabat mereka.

Salah satu contoh yakni kasus Shirin Ebadi yang merupakan seorang feminis Iran. Dominasi laki-laki dan patriarki yang masih melekat pada bangsa Iran mengakibatkan Shirin yang semula menjabat sebagai Hakim ketua diturunkan menjadi sekretaris Hakim. Kebijakan yang menurut Shirin ganjil dan patriarki ini terasa tidak sinkron dengan Pemimpin Tertinggi Iran Pertama, yaitu Ayatullah Khomeini, yang membolehkan perempuan tampil dalam ruang publik. Ebrahim Hosseini melalui Kiki menyebutkan bahwa Ayatullah Khomeini berdasarkan pandangan Islam menyatakan bahwa perempuan Iran memiliki hak yang sama dengan laki-laki seperti hak pendidikan, hak kerja, hak suara, maupun dipilih. Perempuan Islam memiliki hak di mana laki-laki mempunyai hak sebagai makhluk sosial (Mikail 2015).

Terkait dengan persoalan Shirin, Sayid Ali Khamenei, dengan kecakapannya, mampu mengatasi masalah tersebut. Kasus ini melibatkan pertimbangan antara aspek agama dan negara dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Sayid Ali Khamenei berupaya menciptakan masyarakat madani dengan membolehkan profesi hakim baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kapasitas yang dimiliki dan kemampuan yang cakap oleh pelaku (Aiz 2017). Hasil dari kebijakan dapat menciptakan keharmonisan di tengah kehidupan masyarakat sebagai insan madani mulai dirasakan dengan bukti atas kebijakan tersebut tercatat pada tahun 2010 hakim perempuan Republik Islam Iran telah mencapai angka 300 lebih (Mikail 2015).

Upaya menciptakan masyarakat madani yang berlandaskan kesetaraan gender, seperti yang telah dicontohkan, menunjukkan adanya unsur keselarasan antara kebijakan dan pemikiran Al-Qur'an yang diusung oleh Sayid Ali Khamenei. QS. Al Mumtahanah ayat 12 mengisyaratkan hal yang sama, di mana Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menerima baiat seorang perempuan mukmin dengan contoh kepada syariat Islam secara umum, yaitu baiat dengan tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak membunuh anak sendiri, tidak berdusta, dan tidak mengingkari pemimpin (Rasul). Kesejalaran tersebut penulis pahami bahwa Shirin sebagai perempuan mukmin menuntut hak atas kapasitas yang dimilikinya untuk sebuah profesi di ruang publik sebagai perempuan sebagaimana dimiliki oleh laki-laki.

Jauh sebelum kasus di atas, sebenarnya upaya menciptakan masyarakat madani pada isu kesetaraan gender terkait kualitas individu Rahbar sejatinya sudah terjawab pada kisah Masoumeh Ebtekar, namun dalam praktiknya belum optimal. Diketahui bahwa Ayatullah Khomeini menempatkan kemuliaan perempuan pada kesetaraan gender. Hal ini dilihat pada kehadiran Masoumeh, perempuan pertama dalam kabinet semenjak revolusi Islam Iran tahun 1979. Tahun 1997-2005 Masoumeh menjabat sebagai kepala Menteri

Lingkungan Hidup. Tidak tanggung-tanggung, dalam menepis isu kesetaraan gender di Iran dalam mewujudkan masyarakat madani pada 9 Agustus 2017 Masoumeh diangkat menjadi wakil presiden urusan perempuan dan keluarga yang disahkan langsung oleh Fakih Sayid Ali Khamenei (Mikail 2015).

Perjalanan Masoumeh dalam ruang publik dimulai dari Rahbar pertama sampai kedua Iran. Terlepas dari kritik dan kekurangan yang selalu diumpat, kesetaraan gender di Iran telah diupayakan semenjak Ayatullah Khomeini sampai Sayid Ali Khamenei. Kesatuan paham ini menunjukkan kualitas individu seorang Rahbar terhadap identitas nasional dengan pertimbangan agama, sosial, dan budaya. Terlepas dari contoh kasus di atas, upaya menciptakan masyarakat madani pada kesetaraan gender, Sayid Ali Khamenei dalam pidatonya menyampaikan bahwa sebenarnya tudingan kepada Iran yang dinilai patriarki dan meniadakan kesetaraan gender oleh bangsa Barat selama ini tidak dapat dibenarkan, melainkan perempuan Baratlah yang selalu tertindas dan dijadikan alat oleh laki-laki, sementara perempuan muslim diperlakukan dengan kemuliaannya. Berikut kutipan pidato Sayid Ali Khamenei pada *Ansia Haz Ali* pada Juli 2010, dengan judul “Iranian Women After the Islamic Revolution” Adapun bunyi pidato tersebut sebagai berikut:

... setiap sejarah Barat, kaum Barat selalu melakukan penindasan dan penganiayaan terhadap kaum perempuan dengan anggapan kaum perempuan sebagai alat kaum laki-laki. Perempuan harus bisa lepas dari konsepsi yang salah dengan anggapan hanya untuk menghibur laki-laki. Namun, tampaknya pembebasan kaum perempuan dari konsepsi seperti ini agak sulit karena telah menjadi ide dan gagasan orang Barat... (Mikail 2015).

Kutipan pidato tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya menciptakan masyarakat madani merupakan suatu hal yang diupayakan oleh pemimpin suatu negara dengan mengacu kepada kepemimpinan Rasulullah saw. dan ide *al-Madīnah al-Faḍīlah* Al-Farabi. Hal demikian memperlihatkan kualitas individu Sayid Ali

Khamenei terhadap identitas nasionalnya yang berbasis negara Islam terhadap konstruksi sosial seperti kesetaraan gender. Ia selalu berupaya mewujudkan masyarakat yang madani, yaitu masyarakat maju, beradab, dan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Perwujudan tersebut disalurkan melalui kebijakan Rahbar bersama lembaga negara lainnya dengan Undang-undang dan tidak jarang juga dilihat dari sikap, pidato, dan fatwa-fatwanya.

Sayid Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, berupaya menciptakan masyarakat madani melalui kebijakan yang menekankan kesetaraan gender, khususnya dalam peran perempuan di ruang publik. Di bawah kepemimpinannya, perempuan Iran diberi akses yang lebih besar terhadap berbagai sektor kehidupan publik, termasuk pendidikan, kedokteran, dan penelitian. Data yang dicatat oleh Jaja pada tahun 2021 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang-bidang tersebut hampir setara dengan laki-laki. Dalam bidang kedokteran dan pendidikan, angka keterlibatan perempuan tercatat mencapai 97%, mendekati angka 98% untuk laki-laki. Di sektor akademik, jumlah akademisi perempuan juga mengalami peningkatan signifikan, dari 40% pada tahun 2021 menjadi 60%. Bukti lain yang menunjukkan kualitas individu Rahbar terhadap identitas nasional dalam mewujudkan masyarakat madani adalah dengan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Salah satunya adalah penerapan prinsip-prinsip yang terinspirasi dari sistem Madinah semasa Nabi Muhammad, terutama dalam memberikan hak kepada kelompok minoritas di Iran. Di bawah kepemimpinan Sayid Ali Khamenei, kelompok-kelompok minoritas diberikan perwakilan dalam pemerintahan Republik Islam Iran, memastikan mereka memiliki akses dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat (Juwita 2021).

Pada 4 Juli 2007, dalam sebuah pertemuan bersama jajaran aktivis perempuan dan elit perempuan Republik Islam Iran, Sayid Ali Khamenei menyampaikan dalam pidatonya bahwa masa

keemasan perempuan di Iran baru terjadi pada saat itu. Klaim ini ia pertanggungjawabkan dengan menunjukkan bukti bahwa pada masa tersebut, perempuan telah menjadi periset, cendekiawan, pemikir, sastrawan, seniman, dan aktivis sosial-politik yang berperan penting dalam masyarakat. Dengan ini, Sayid Ali Khamenei menekankan upayanya dalam mewujudkan masyarakat madani yang memperjuangkan kesetaraan gender, yang juga mencerminkan kualitas individu dan komitmennya terhadap identitas nasional Republik Islam Iran (Leader.ir 2013).

Prestasi Perempuan Iran

Melacak prestasi perempuan Iran sebagai hasil dari gerakan kesetaraan gender memiliki porsi yang berbeda dibandingkan dengan prestasi perempuan di ruang publik lainnya, seperti kemenangan timnas putri Jepang dalam Piala Dunia atau atlet panjat tebing perempuan Indonesia. Dalam konteks Iran, konstitusi negara mengamanatkan kesetaraan gender yang tercermin dalam ruang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, prestasi perempuan Iran lebih diukur berdasarkan kehadiran mereka di ruang-ruang yang telah difasilitasi oleh negara. Secara umum, hasil dari gerakan kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh perempuan Iran dapat diapresiasi sebagai prestasi signifikan dalam bidang sosial masyarakat dan pendidikan. Sebelumnya, perempuan di Iran sangat terbatas bahkan tidak memiliki akses ke ruang publik atau pendidikan. Namun, dengan adanya gerakan ini, perempuan Iran mulai hadir dalam ruang publik, terutama dalam pendidikan. Walaupun masih ada batasan, hasil dari gerakan kesetaraan gender ini tetap dianggap prestasi, salah satunya adalah hak suara perempuan dalam politik, yang menjadi kebanggaan perempuan Iran (Shofiyah 2019).

Contoh lainnya dapat dilihat pada perjuangan perempuan Iran dalam bidang hukum. Shirin Ebadi sebagai pelopor akhirnya mempunyai kesetaraan dalam bidang hukum dengan izin

mendirikan kantor advokat sendiri. Selain itu, tercatat ada sekitar 300 perempuan yang terlibat dalam bidang kehakiman di Iran (Mikail 2015). Perempuan memanfaatkan pendidikan sebagai sarana untuk mengatasi gelombang konservatif, sementara negara menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun pemberdayaan dan keterampilan perempuan. Di bidang sosial, perempuan Iran aktif membangun kelompok organisasi untuk menjaga budaya mereka dari pengaruh Barat. Dalam bidang ekonomi, prestasi gerakan sosial perempuan dapat dilihat dari pembentukan ketenagakerjaan perempuan oleh pemerintah Iran, yang mencakup aturan-aturan yang mendukung pendidikan dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik (Shofiyah 2019).

Conclusion

Masyarakat adalah elemen penting dalam pembentukan sebuah negara, dan dalam kemajuan zaman, dinamika kehidupan sosial turut membawa konstruksi sosial baru seperti kesetaraan gender. Gerakan kesetaraan gender menuntut pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam peran-peran yang ada di ruang publik. Masyarakat madani, yang merupakan refleksi dari masyarakat yang maju dan beradab, memegang teguh nilai agama dalam sebuah negara. Konsep *al-Madīnah al-Faḍīlah*, yang mendasari pola kehidupan sosial di masa Rasulullah, menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin dan masyarakat dalam membangun negara yang adil dan beradab.

Dalam konteks ini, Republik Islam Iran pasca-revolusi mengadopsi ideologi teo-demokrasi yang mendirikan sistem Wilāyat al-Faqīh, dengan Pemimpin Tertinggi atau Rahbar sebagai penjaga dan pengarah jalannya negara. Sayid Ali Khamenei, sebagai Rahbar, berperan penting dalam mewujudkan masyarakat madani di tengah isu kesetaraan gender. Meskipun ada berbagai tantangan, Sayid Ali Khamenei berusaha menempatkan perempuan dalam posisi mulia

sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan mereka mendapatkan peran yang layak dalam kehidupan sosial, sambil tetap menjaga dan menghormati ajaran agama dan budaya Islam.

References

- Afridah, Marlis. n.d. "Belajar Kesetaraan Gender dalam Islam." Ngaji KGI. Accessed April 20, 2023. <https://youtu.be/o2UTWvJ-7Ls>.
- Aiz, Muhammad. 2017. "Hakim Perempuan dalam Perspektif Islam." *Al-Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2): 1-20.
- Anam, Moh. Chairul. 2022. "Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 dalam Perspektif Shirin Ebadi." Master's Thesis. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Andariati, Leni. 2020. "Filsafat Politik Plato." *Jurnal Review Politik* 10 (1): 98-115.
- Aravik, Havis, and Achmad Irwan Hamzani. 2019. "Homo Islamicus dan Imperfect State: Konsep Manusia dan Madinah Al-Fadhilah Menurut Al Farabi." *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 4 (1): 2548-3102.
- Aritonang, Rahmadi Pratama. 2019. "Operasi Siber Ofensif Iran Terhadap Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi: Kepentingan dan Strategi Siber Ofensif Iran." Surabaya: Universitas Airlangga.
- Baidhawiy, Zakkiyuddin. 2016. "Diskursus Civil Society Dalam Perspektif Filsafat Barat Dan Islam." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1 (2): 17-34.
- Efendy, Rustan. 2014. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan." *Al Maiyyah* 7 (2): 142-165.
- Febriani, Ina Salmah. 2021. "Keseimbangan Karakter Feminin Dan Maskulin Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani." *Tsaqafah* 19 (1): 45.
- Gerung, Rocky, and Hersubeno Arief. n.d. "Renungan Iedul Fitri 1444 H: Negara Ciptakan Kesenjangan Antara Si Kaya & Si Miskin

- Makin Jauh.” Accessed April 23, 2023. https://youtu.be/W_U04PF-Oww.
- Gunawijaya, Rahmat. 2017. “Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam.” *Mastahah* 13 (1): 131.
- Hadi, Sutrisno. 1999. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hidayat, Misbach, and Khairul Umam. 2004. *Fatwa-Fatwa Sayyid Ali Khamenei: Pemimpin Revolusi Islam Iran*. Bogor: Humaniora Press.
- Hidayat, Wahyu. 2023. “Reaktualisasi Wilayahul Faqih: Tafsir Politik Seyyed Ali Khamenei.” *Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 14 (1): 63-84.
- Irnaningsih. 2008. “Republik Islam Iran (Studi Atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005).” Bachelor’s Thesis. Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Juwita, Jaja. 2021. “Pemikiran Ayatullah Khomeini dan Relevansi Wilayah Al Faqih Terhadap Relasi Agama dan Demokrasi Di Iran.” Master’s Thesis. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.
- KBBI Online. n.d. “Arti Kata Revolusi.” KBBI Online. Accessed April 20, 2023. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/revolusi>.
- Khamenei, Sayid Ali. 2008. *The Wisdom: Pesan-Pesan Monumental Ali Khamenei*. Edited by Salman Parisi. Translated by Arif Mulyadi. Jakarta: Al-Huda.
- . 2021. *Muntakhab al Ahkam: Fatwa-Fatwa Kontemporer Seputar Ibadah Dan Muamalah*. Jakarta: Nur Al-Huda.
- Kurniawan, Puji. 2018. “Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi.” *Jurnal El Qanuny* 4 (1): 101-115.
- Leader.ir. 2013. “Rahbar: Kenalkan Kepada Dunia Pandangan Islam Tentang Perempuan.” Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei. May 11, 2013. <https://www.leader.ir/id/content/10701/Rahbar-Kenalkan-kepada-Dunia-Pandangan-Islam-Tentang-Perempuan>.
- Maksum, Ali. 2006. *Pengantar Filsafat Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Marchelia, Andria, and M. Dzulfikar Syaiful Ali. 2022. "Perbandingan Kepastian Hukum Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Islam Iran." *Mimbar Keadilan* 15 (2): 142-158.
- Marpaung, Lintje Anna. 2018. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mazaya, Viky. 2014. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam." *Sawwa* 9 (2): 323-343.
- Mikail, Kiki. 2015. "Politik Dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan Pasca Revolusi Islam 1979." *Jurnal ADDIN* 9 (2): 253-276.
- Muhammad, Nurdiah. 2017. "Masyarakat Madani Dalam Perspektif Al Quran." *Jurnal Al Mu'ashirah* 14 (1): 43-60.
- ParsToday. 2021. "Perempuan Dalam Perspektif Rahbar." February 9, 2021.
- Qobbani, Nizar. 2021. *Tanah Yang Terjajah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Republik Indonesia. n.d. "Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945."
- Ritaudin, M. Sidi. 2012. "Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah." *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung* 6 (1): 151-176.
- Riza, A. Kemal. 2017. "Menakar Ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi Antara Ideologi Dan Pragmatisme Dalam Politik." *Ad-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7 (2): 279-301.
- Said, Abdullah. 2019. "Filsafat Politik Al-Farabi." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1 (1): 63-78.
- Shahab, Umar. 2023. "Perkuliahan Filsafat Politik Islam Terkait Bagaimana Peran Perempuan Di Ruang Publik Dan Sandingan Terhadap Negara Agamis." Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, March 24.
- Shofiyah, Anis. 2019. "Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (Pra Dan Pasca Revolusi 1979)." Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sulistiyowati, Yuli. 2020. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *Indonesian Journal of Gender Studies* 1 (2): 1-14.
- Yazdi, M.T. Mishbah. 2021. *Kitab Filsafat: Pendekatan Komparatif Filsafat Islam*. Jakarta: Sadra Press.